

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penyajian Kembali

Amelia Helsa¹, Evelyn Jovita², Sany^{3*}

^{1,2,3}Accounting Department, Petra Christian University, Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, Indonesia

*Corresponding author; Email: ³*sany@petra.ac.id

ABSTRACT

Restatement is a matter that needs to be considered where the number of restatements continues to be known by the public. The results found from previous studies regarding the types of ownership have not shown consistent results so that this study aims to analyze the effect of types of ownership on restatement. In this study, restatement was measured by a dummy variable. Meanwhile, the independent variables used are ownership types. In addition, firm size and leverage are used as control variables. The data used in this study is data originating from the financial sector listed on the IDX with purposive sampling technique in 2015-2020. The method uses logistic regression analysis with Software Statistical Package For Social Science (SPSS). Based on the results of the study, it shows that government ownership and managerial ownership have no effect on restatement. However, institutional ownership has a negative effect on restatement.

Keywords: government ownership; institutional ownership; managerial ownership; restatement; leverage; firm size

ABSTRAK

Penyajian kembali menjadi hal yang perlu diperhatikan dimana jumlah penyajian kembali terus diketahui oleh publik. Hasil yang ditemukan dari penelitian terdahulu mengenai tipe-tipe kepemilikan belum menunjukkan hasil yang konsisten sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tipe-tipe kepemilikan terhadap penyajian kembali. Pada penelitian ini penyajian kembali diukur dengan variabel dummy. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah tipe-tipe kepemilikan. Selain itu firm size dan leverage digunakan sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sektor keuangan yang terdaftar dalam BEI dengan teknik purposive sampling pada tahun 2015-2020. Metode menggunakan analisa regresi logistik dengan Software Statistical Package For Social Science (SPSS). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kepemilikan pemerintah dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penyajian kembali. Namun kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penyajian kembali.

Kata kunci: kepemilikan pemerintah; kepemilikan institusional; kepemilikan manajerial; penyajian kembali; leverage; firm size

PENDAHULUAN

Penyajian kembali keuangan dapat menimbulkan kekhawatiran terutama dari salah saji keuangan yang tercatat di perusahaan. Hal ini dikarenakan, informasi akuntansi yang diungkapkan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu sumber data terpenting bagi investor dalam menganalisa dan mengevaluasi suatu perusahaan [10]. Penyajian kembali menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan pada tahun sebelumnya tidak

kredibel dan kualitasnya relatif rendah [2]. Penyajian kembali keuangan didefinisikan sebagai proses untuk melakukan revisi dan koreksi atas laporan keuangan yang dirilis sebelumnya untuk memperbaiki semua kesalahan, ketidaktaatan, atau pelanggaran pada prinsip akuntansi secara umum [1]. Penyajian kembali keuangan telah terjadi sejak dahulu. Namun, studi tentang penyajian kembali keuangan menjadi meningkat setelah terjadinya skandal audit global yaitu kasus terkenal seperti Enron dan WorldCom [1].

Statement of Financial Accounting

Standards No. 154 membahas tentang perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan serta menyatakan bahwa setiap kesalahan dalam penyajian kembali keuangan yang ditemukan di periode sebelumnya harus dilaporkan sebagai penyesuaian penyajian kembali laporan keuangan periode tersebut [16]. Penyajian kembali keuangan mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penyajian kembali keuangan dapat menjadi perspektif baru yang penting untuk menyelidiki efektivitas tata kelola perusahaan [17].

Terdapat kasus yang terjadi di Indonesia mengenai penyajian kembali pada laporan keuangannya yaitu PT Garuda Indonesia yang ditemukan memiliki kesalahan dalam pencatatan keuangan pada tahun 2018 dimana seharusnya PT Garuda Indonesia mencatat piutang dan bukan pendapatan. Kasus ini dianggap telah melanggar peraturan OJK No. 29 tahun 2016 terkait laporan keuangan sehingga harus melakukan penyajian kembali paling lambat pada 26 Juli tahun 2019 [29] [7]. Selain kasus PT Garuda Indonesia terdapat kasus lain pada sektor keuangan yaitu PT ASABRI dimana pada tahun 2016 PT ASABRI diduga melakukan tindak korupsi dan melakukan manipulasi pada laporan keuangan sehingga terdapat penurunan laba [8]. Dengan adanya tindak korupsi atau kecurangan tersebut dapat merugikan berbagai pihak karena telah melakukan tindak penipuan dan mengharuskan untuk melakukan penyajian kembali laporan keuangan perusahaan.

Menurut [24], struktur kepemilikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas data akuntansi karena di setiap perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang berbeda. Struktur kepemilikan yang berbeda tersebut mempengaruhi kinerja dalam tingkat dan cara pengendalian manajemen di perusahaan. Kepemilikan pemerintah tidak memiliki hubungan dengan *financial restatement* [28] [4]. Sedangkan menurut [39], kepemilikan pemerintah ditemukan memiliki pengaruh yang positif terhadap penyajian kembali. Kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian penyajian kembali pelaporan keuangan [36]. Namun, ditemukan hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh [11] [33] [4] menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penyajian kembali laporan

keuangan suatu perusahaan. Menurut, [4] kepemilikan saham manajerial yang dimiliki oleh manajemen berhubungan negatif dengan penyajian kembali. Bukti menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memang dapat mengurangi biaya agensi dan efektif dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen [13]. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian [1] [5] yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali keuangan.

Hasil yang ditemukan dari penelitian terdahulu mengenai tipe-tipe kepemilikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan belum menunjukkan hasil yang konsisten. Selain itu, contoh kasus *restatement* memotivasi peneliti untuk menjadikan sektor keuangan sebagai objek penelitian dimana pada sektor keuangan ini menunjukkan tingkat penyajian kembali yang paling banyak ditemukan jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menambahkan bukti mengenai pengaruh tipe kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penyajian kembali laporan keuangan pada sektor keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2020.



Gambar 1. Perusahaan BEI yang mengalami restatement pada tahun 2015

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori agensi merupakan hubungan pihak manajer (*agent*) dengan pihak investor (*principle*), dimana *principle* memberikan wewenang pengambilan keputusan di perusahaan kepada pihak manajemen untuk memastikan proses operasional berjalan dengan lancar. konflik antara *principle* dan *agent* dapat diminimalkan dengan menyelaraskan kepentingannya [21]. *Principle* dapat membatasi terjadinya penyimpangan dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk manajer dan dengan mengeluarkan

biaya pemantauan yang telah dirancang untuk membatasi aktivitas yang menyimpang dari manajer. *Agent* akan bertindak sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh *principle* sehingga kepentingan *principle* akan terpenuhi.

Signaling Theory

Signaling theory mengasumsikan adanya asimetri informasi dimana manajer memiliki informasi tentang nilai-nilai perusahaan yang akurat dan mungkin informasi tersebut tidak diketahui oleh investor [38]. Informasi asimetris akan terjadi jika manajer tidak menyampaikan semua informasi yang dimilikinya tentang nilai perusahaan, sehingga mempengaruhi investor dimana hal ini menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Informasi asimetris penting karena dapat memicu sinyal kepada investor atau publik melalui kebijakan manajemen. *Signaling theory* berkaitan dengan pengurangan asimetri informasi bagi investor. Namun, kualitas sinyal tergantung pada kemampuan investor untuk menganalisis informasi [30]

Corporate Governance

Menurut [37] tata kelola perusahaan adalah mekanisme untuk memastikan sistem kontrol dan keseimbangan yang efektif, sehingga manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan adanya struktur tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan hak dan tanggung jawab kepada peserta dalam perusahaan seperti manajer, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan dalam menguraikan peraturan serta prosedur dalam membuat keputusan mengenai urusan perusahaan [22]. Pengaturan prinsip mengenai *Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada pasal 3 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.

Firm Size

Ukuran perusahaan menggambarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Aset tersebut dapat berupa aset keuangan dan aset non keuangan [20] Informasi tentang ukuran

perusahaan sangat penting bagi investor [23]. Selain itu, ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara seperti jumlah karyawan, total aset, pendapatan, total modal, dan nilai pasar saham [20]. Ukuran perusahaan digunakan sebagai informasi yang tersedia di pasar dimana informasi perusahaan yang besar cenderung akan lebih tersedia daripada perusahaan kecil dan akan sering melakukan penyajian kembali keuangan sebagai akibat dari keahlian dan fasilitas yang tidak memadai. [32].

Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang seperti pembayaran pokok hutang terakhir, pembayaran bunga atas hutang, dan kewajiban tetap lainnya [15]. Kinerja yang lebih besar dan tingkat *leverage* yang lebih rendah meminimalkan tekanan keuangan perusahaan dan risiko pelanggaran perjanjian utang yang dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan salah saji laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan kemungkinan penyajian kembali keuangan [19]

Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Penyajian kembali dapat didefinisikan sebagai penyesuaian laporan keuangan karena kegagalan dalam memenuhi persyaratan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) [1] Berdasarkan GAAP, penyajian kembali mencakup dua kategori utama. Pertama, penyajian kembali sebagai akibat dari perubahan prinsip akuntansi dan kedua, sebagai akibat dari kesalahan akuntansi [12]. Penyajian kembali keuangan adalah koreksi kesalahan yang dihasilkan dari ketidakpatuhan GAAP [11]. Menurut, [17] menyatakan bahwa sebuah pernyataan kembali laporan keuangan dapat terjadi ketika suatu perusahaan secara sukarela atau diminta oleh auditor untuk melakukan revisi pada informasi keuangan publik yang dilaporkan di tahun sebelumnya.

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah sebagai wakil negara dalam suatu perusahaan. Secara normatif, badan usaha milik pemerintah di Indonesia diatur oleh dua peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BUMN dan BUMD adalah suatu badan usaha yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, dengan tujuan mengejar keuntungan.

Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kejadian penyajian kembali keuangan di Cina karena prinsip hubungan agen milik perusahaan BUMN lebih rumit dan pihak manajemen cenderung lebih mudah untuk hilang kendali yang mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. [39]. Menurut [28] kepemilikan pemerintah cenderung akan menyatakan kembali laporan keuangannya. Kepemilikan pemerintah pada perusahaan melibatkan birokrasi pemerintah yang dapat meningkatkan biaya keagenan [37] Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap penyajian kembali.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah pihak yang ada dalam bentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perseroan terbatas, dan institusi lainnya [35] [25]. Investor institusional memiliki kemampuan dan sumber daya dalam melakukan pengawasan pada manajer secara efektif dan dapat melarang manajer memanipulasi data akuntansi [28]. Menurut [18], menunjukkan bahwa kepemilikan institusional meningkatkan proses pemantauan dan mengurangi biaya agensi. Menurut [35] kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif terhadap terjadinya penyajian kembali laporan keuangan dimana kepemilikan institusional yang lebih tinggi akan menurunkan kemungkinan penyajian kembali. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penyajian kembali.

Kepemilikan Manajerial

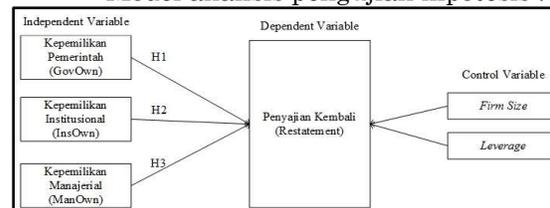
Kepemilikan manajerial adalah susunan pemegang saham dari bagian manajemen perusahaan seperti direksi, jajaran manajerial, dan komisaris yang bertanggung jawab mengambil keputusan

dalam perusahaan [14]. Adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan memecahkan masalah keagenan karena adanya manajer yang juga berperan sebagai pemilik. Kepemilikan manajerial akan mengurangi masalah keagenan karena terdapat manajer yang juga bertindak sebagai pemilik sehingga penyajian kembali keuangan dapat diminimalkan [1]. Menurut [4] kepemilikan saham manajerial yang dimiliki oleh manajemen berhubungan negatif dengan penyajian kembali. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penyajian kembali.

METODE PENELITIAN

Model Analisis

Model analisis pengujian hipotesis :



Gambar 2. Model Analisis

Hipotesis akan diuji menggunakan metode regresi logistik dengan persamaan sebagai berikut:

$$RESTATE_{it} = \beta_0 + \beta_1 GovOwn_{it} + \beta_2 InsOwn_{it} + \beta_3 ManOwn_{it} + \beta_4 Size_{it} + \beta_5 Lev_{it} + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

- $RESTATE_{it}$ = penyajian kembali
- β_0 = konstanta
- β_{1-5} = koefisien regresi variabel independen
- $GovOwn_{it}$ = kepemilikan pemerintah
- $InsOwn_{it}$ = kepemilikan institusional
- $ManOwn_{it}$ = kepemilikan manajerial
- $Size_{it}$ = firm size
- Lev_{it} = leverage / Debt to Total Asset Ratio (variabel kontrol)
- ε = standar error

Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Variabel Dependen

Penyajian kembali diukur menggunakan variabel dummy dimana jika

nilai yang dihasilkan adalah “1” maka perusahaan menyatakan kembali laporan keuangan sedangkan nilai “0” jika perusahaan tidak menyatakan kembali laporan keuangannya.

Variabel Independen

Kepemilikan pemerintah diukur menggunakan rumus sebagai berikut :
 $GovOwn = \frac{\text{Total Saham dimiliki Pemerintah}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$ (2)

Kepemilikan institusional diukur menggunakan rumus sebagai berikut :
 $InsOwn = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$ (3)

Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rumus sebagai berikut :
 $ManOwn = \frac{\text{Kepemilikan Saham Manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$ (4)

Variabel kontrol

Firm Size diukur menggunakan rumus sebagai berikut :
 $Firm Size = \ln(\text{Total Assets}_{it})$ (5)

Leverage diukur menggunakan rumus sebagai berikut:
 $Debt to Total Asset Ratio = \frac{\text{Total Debt}_{it}}{\text{Total Asset}_{it}}$ (6)

Pemilihan, Pengumpulan, dan Teknik Data

Jenis data menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder untuk mencari variabel independen yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website *www.idx.co.id* dan *bloomberg*. Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi [3]. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan *software* SPSS versi 26.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan 390 sampel data dari 65 perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar pada BEI periode 2015-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tidak *listing* setelah tahun 2015.
2. Perusahaan tidak *delisting* pada periode 2015-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Jumlah sampel yang digunakan adalah 65 perusahaan di sektor keuangan pada periode 2015-2020, terdapat 390 sampel penelitian yang digunakan.

Tabel 1. Hasil Penelitian Sampel

Sampel	Jumlah Pengamatan
Perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.	113
Perusahaan yang tidak memiliki data dan informasi perusahaan lengkap yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.	(14)
Perusahaan yang <i>listing</i> setelah tahun 2015.	(25)
Perusahaan <i>delisting</i> pada periode 2015-2020.	(0)
Perusahaan dengan data yang <i>outliers</i>	(9)
Total Sampel Perusahaan	65
Jumlah tahun penelitian (2015-2020)	6 tahun
Jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian	390

Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil analisa statistik deskriptif berdasarkan pada data-data sampel penelitian yang diperoleh pada variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial :

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GovOwn	390	.0000	.8000	.061614	.1909914
InsOwn	390	.0000	.9913	.611061	.2901291
ManOwn	390	.0000	.6156	.018434	.0738041
Size	390	23.0000	35.0000	30.005128	2.3792104
Lev	390	.0000	5.7200	.306282	.4509262
Valid N (listwise)	390				

Berdasarkan pada tabel 2 diatas, kepemilikan pemerintah memiliki jangkauan dari 0.00 hingga 0.80, nilai tertingginya adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2015, dan nilai rata-rata sebesar 0.061614 yang berarti perusahaan yang menjadi sampel memiliki persentase rata-rata kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah sebesar 6.16%. Variabel kepemilikan institusional memiliki jangkauan dari 0.00 hingga 0.99 dimana nilai jangkauan tertinggi adalah perusahaan Radana Bhaskara Finance Tbk di tahun 2020, dan nilai rata-rata sebesar 0.611061 yang dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki persentase *mean* yang dimiliki oleh pihak institusi sebesar 61.10%. Variabel kepemilikan manajerial memiliki jangkauan dari 0.00 hingga 0.6156 dimana nilai tertingginya dimiliki oleh Asuransi Ramayana Tbk tahun 2020, dan nilai rata-rata sebesar 0.018434 yang menunjukkan

bahwa persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen sebesar 1.84% dari rata-rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Variabel *firm size* memiliki jangkauan dari 23 hingga 35, dan nilai rata-rata *firm size* perusahaan pada sampel penelitian ini memiliki total aset yaitu berupa aset keuangan maupun aset non keuangan dengan nilai *mean* sebesar 30.005. Variabel *leverage* memiliki jangkauan dari 0 hingga 5.72 dan nilai rata-rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini memiliki nilai sebesar 0.3062 dimana nilai *mean Debt to Total Asset Ratio* (DAR) berarti sejauh mana jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

Tabel 3. Frekuensi Penyajian Kembali

Restatement		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Restatement	256	65.6	65.6	65.6
	Restatement	134	34.4	34.4	100.0
Total		390	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa dari 390 data sampel perusahaan di sektor keuangan terdapat 256 perusahaan yang tidak melakukan penyajian kembali atau setara dengan 65.6% dari total sampel dan perusahaan yang melakukan penyajian kembali terdapat 134 perusahaan atau yang setara dengan 34.4%.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	GovOwn	.407	2.457
	InsOwn	.484	2.067
	ManOwn	.875	1.143
	Size	.610	1.638
	Lev	.789	1.268

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas antara *GovOwn*, *InsOwn*, *ManOwn*, *Size*, dan *Lev* karena nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 (VIF<10) dan nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0.1.

Uji Kelayakan Model

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Tabel 5. Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.774	8	.781

Berdasarkan pada tabel 5, menunjukkan bahwa nilai signifikan 0.781 lebih besar dari 0.05 (*p-value*) sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dihipotesiskan sesuai dengan data karena model dapat memprediksi nilai observasinya.

Hasil Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test)

Tabel 6. -2 Log Likelihood (Block Number = 0)

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	501.884
	2	501.843
	3	501.843

Tabel 7. -2 Log Likelihood (Block Number = 1)

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients						
History, b, c, d	Iteration	Constant	GovOwn	InsOwn	ManOwn	Size	Lev	
Step 1	1	493.296	-2.376	-1.698	-1.116	-2.692	.083	.305
	2	492.952	-2.661	-1.907	-1.236	-3.512	.094	.342
	3	492.949	-2.667	-1.914	-1.240	-3.627	.095	.343
	4	492.949	-2.667	-1.914	-1.240	-3.629	.095	.343
	5	492.949	-2.667	-1.914	-1.240	-3.629	.095	.343

Berdasarkan pada tabel 6 dan tabel 7, pengujian *overall model fit test* menunjukkan hasil nilai *-2log likelihood* awal sebesar 501.843 (*block number = 0*) dan nilai *-2log likelihood* akhir sebesar 492.949 (*block number = 1*). Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penurunan nilai *-2log likelihood* awal ke *-2log likelihood* akhir berarti model regresi logistik yang terbentuk menunjukkan model regresi yang baik dan sudah sesuai dengan data.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	492.949a	.023	.031

Berdasarkan pada tabel 8, nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.031 dimana hal ini menunjukkan variabel independen dan variabel kontrol mampu untuk menjelaskan atau memberikan pengaruh kepada variabel dependen yaitu sebesar 3.1% dan terdapat 96.9% (100%-3.1%) faktor lain di luar model analisis penelitian yang menjelaskan atau memberikan pengaruh kepada variabel dependen.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Wald (Uji Parsial t)

Tabel 9. Uji Wald (Uji Parsial t)

Variables in the Equation		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1a	GovOwn	-1.914	.900	4.528	1	.033	.147
	InsOwn	-1.240	.529	5.497	1	.019	.289
	ManOwn	-3.629	2.129	2.905	1	.088	.027
	Size	.095	.059	2.594	1	.107	1.099
	Lev	.343	.269	1.633	1	.201	1.410
	Constant	-2.667	1.718	2.410	1	.121	.069

Berdasarkan tabel 9, maka dapat dibentuk persamaan regresi logistik sebagai berikut :

$$\text{Ln (NFD/1-NFD)} = -2.667 - 1.914 \text{ GovOwn} - 1.240 \text{ InsOwn} - 3.629 \text{ ManOwn} + 0.095 \text{ Size} + 0.343 \text{ Lev}$$

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Penyajian Kembali

Berdasarkan pada hasil uji t yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap penyajian kembali sehingga **hipotesis pertama (H1) ditolak** karena meskipun nilai signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.033 namun nilai koefisien *GovOwn* sebesar -1.914 yang menyatakan pengaruh yang negatif dimana hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap penyajian kembali. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu menurut [39] dimana kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif pada penyajian kembali. Berdasarkan pada tabel 2 nilai rata-rata kepemilikan pemerintah sebesar 6.16%, kepemilikan tersebut tergolong kecil yang berarti dengan adanya kepemilikan saham pemerintah masih kurang dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dalam perusahaan sehingga penyajian kembali dapat meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [4] dimana kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh dengan terjadinya kejadian *financial restatement* pada perusahaan dimana tingkat kepemilikan pemerintah yang lebih tinggi di perusahaan dapat menciptakan nilai yang kuat untuk menahan manajemen dalam insiden penyajian kembali keuangan di Malaysia. Pemerintah berperan penting untuk menjaga kinerja perusahaan sehingga penyajian kembali dapat dapat diminimalkan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penyajian Kembali

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penyajian kembali karena hasil uji t menunjukkan nilai p-value yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.019 dan nilai koefisien beta sebesar -1.240 sehingga **hipotesis kedua (H2) diterima**. Berdasarkan tabel 2 mengenai statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 61.10% yang dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional tergolong cukup tinggi. Maka dari itu, asumsi ini terbukti dimana semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki maka akan semakin besar pula hak yang dimiliki oleh investor dalam memaksimalkan nilai perusahaan, seperti dengan melakukan pengawasan atau *monitoring* atas kinerja para karyawan perusahaan sehingga mampu menurunkan kemungkinan terjadinya *restatement* atas laporan keuangan perusahaan yang dapat merugikan banyak pihak terutama investor.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen karena dengan adanya investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut [35] yaitu kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan perusahaan oleh investor institusional sehingga dapat meminimalkan perilaku manajemen oportunistik dan dapat mengurangi insiden penyajian kembali keuangan. Menurut [9] menyimpulkan bahwa investor institusional memiliki lebih banyak sumber daya dalam mengumpulkan informasi dan lebih memiliki hak dalam mengakses informasi secara tepat waktu daripada investor non-institusional sehingga kepemilikan institusional lebih memiliki peran dalam melaksanakan pemantauan yang dapat membatasi sikap oportunistik manajemen. Selain itu menurut [18], kepemilikan institusional juga dapat meningkatkan proses pemantauan dan dapat mengurangi biaya agensi akibat konflik keagenan karena adanya penyajian kembali keuangan dalam perusahaan menunjukkan kualitas laporan keuangan yang kurang baik bagi investor sehingga dengan adanya pemantauan, investor institusional dapat menurunkan kejadian penyajian kembali keuangan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penyajian Kembali

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai koefisien -3.629, dan nilai signifikan sebesar 0.088 yang berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali laporan keuangan sehingga **hipotesis ketiga (H3) ditolak**. Hal ini serupa dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [1] [5] yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penyajian kembali keuangan karena dengan kepemilikan manajerial yang tinggi tidak menjamin adanya pemantauan terhadap perusahaan dengan lebih baik dimana hal ini konsisten dengan bukti sebelumnya di Amerika Serikat. Selain itu penelitian menurut [31] menyatakan hal yang sama yaitu kepemilikan manajerial tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap penyajian kembali keuangan perusahaan walaupun kepemilikan manajemen yang tinggi dapat menyelesaikan masalah keagenan, tetapi pihak manajemen cenderung untuk lebih mementingkan kepentingan dan keuntungannya sendiri. Tingkat kepemilikan yang tinggi dapat menyebabkan efek *entrenchment* yang berarti dengan kepemilikan manajerial yang tinggi maka manajemen memiliki hak suara yang cukup besar sehingga dapat lebih mengendalikan dan mengawasi perusahaan dimana pihak eksternal akan cenderung untuk lebih sulit dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan [25].

Berdasarkan pada hasil statistik deskriptif tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata sebesar 1.84%, dimana hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial tergolong sangat kecil sehingga manajemen kurang untuk melakukan pengawasan secara efektif karena perusahaan lebih dikuasai oleh pihak pemegang saham lainnya yang lebih dominan daripada pihak manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen tidak dapat menjamin kualitas laporan keuangan yang lebih baik, sehingga hubungan antara kepemilikan manajerial dengan penyajian kembali keuangan perusahaan dianggap tidak relevan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan adalah Hipotesis pertama (H1)

ditolak, penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan pemerintah dapat meminimalkan terjadinya penyajian kembali. Hipotesis ketiga (H3) ditolak, dimana kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penyajian kembali, dan Hipotesis kedua (H2) diterima, yang berarti semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional dapat meminimalkan terjadinya penyajian kembali.

Berikut saran yang kami berikan berdasarkan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu 1). Penelitian hanya menggunakan sampel perusahaan yang ada di sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020 sehingga pada penelitian berikutnya dapat memperluas kajian penelitian yang dilakukan pada sektor lainnya. 2). Penyajian kembali dalam penelitian ini hanya meneliti pengaruh 3 tipe kepemilikan yang telah dijelaskan diatas, sehingga pada penelitian berikutnya dapat menambah variabel atau pengukuran lain seperti kepemilikan *blockholder* karena cukup banyak ditemukan kepemilikan tersebut pada *annual report* perusahaan dengan kriteria kepemilikan paling sedikit sebesar 5% yang dimiliki individu dari seluruh modal saham milik perusahaan [34]. Selain itu peneliti juga dapat menambah atau memperpanjang periode penelitian. 3). Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol saja yaitu ukuran perusahaan dan leverage sehingga pada penelitian selanjutnya dapat memperluas pengukuran yang dapat digunakan seperti *Return On Assets (ROA)*, *asset turnover*, dan lainnya. 4). Bagi perusahaan, dapat lebih mempertimbangkan mengenai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan dengan lebih meningkatkan pengawasan pada perusahaan karena dapat berpengaruh terhadap keputusan investor dalam menanamkan modal pada perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdullah, S. N., Yusof, N. Z. M., & Nor, M. N. M. (2010). Financial restatements and corporate governance among Malaysian listed companies. *Managerial Auditing Journal*, 25(6), 526–552.
- [2] Anderson, K. L. & Yohn, T. L. (2002). The effect of 10-K restatements on firm value, information asymmetries, and

- investors' reliance on earnings. *Information Asymmetries, and Investors' Reliance on Earnings*.
- [3] Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT. Rineka Cipta.
- [4] Aziz, N. F., Mohamed, M., Hasnan, S., Sulaiman, N., & Aziz, R. A. (2017). Ownership structure and financial restatement in Malaysia. *Pertanika Journal of Science and Technology*, 25, 227-236.
- [5] Baber, W. R., Kang, S., & Liang, L. (2005). Strong boards, management entrenchment, and accounting restatement. *George Washington University*.
- [6] Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (2003). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/19tahun2003uu.htm>
- [7] Banjarnahor, D. (2019), Garuda: Restatement Lapkeu 2018 Paling Lambat 26 Juli. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190712183845-17-84609/garuda-restatement-lapkeu-2018-paling-lambat-26-juli>.
- [8] Banjarnahor, D. (2020). Lapkeu 2016 Asabri Di-Restatement, Laba Menguap Rp 421 M. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200115170300-17-130268/lapkeu-2016-asabri-di-restatement-laba-menguap-rp-421-m>.
- [9] Bhattacharya, N. (2001). "Investors' Trade Size and Trading Responses around Earnings Announcements: An Empirical Investigations". *The Accounting Review*, 76(2), 221-244.
- [10] Breton, G., & Taffler, R. J. (1995) Creative accounting and investment analyst response. *Accounting and Business Research*, 25(98), 81-92.
- [11] Butar, S. B. (2018). The causes and consequence of restatements in Indonesia. *In Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 70–80.
- [12] Callen, J. L., Livnat, J., & Segal, D. (2006). Accounting restatements: Are they always bad news for investors?. *The Journal of Investing*, 15(3), 57-68.
- [13] Dimmock, S. G., Gerken, W. C., & Marietta-Westberg, J. (2015). What determines the allocation of managerial ownership within firms? Evidence from investment management firms. *Journal of Corporate Finance*, 30, 44–64.
- [14] Diyah, P., & Erman, W. (2009). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura*, 2(1), 71-86.
- [15] Fahira, N. S., Amira, A., & Firmansyah, A. (2020). Profitability, Liquidity, Leverage, and Firm Risk: Evidence From Indonesian Tobacco Industry. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*. 4(4).
- [16] FASB (2005), Statement of Financial Accounting Standards No. 154 Accounting Changes and Error Corrections, available at: www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol¼urldata&blobtable¼MungoBlobs&blobkey¼id&blobwhere¼1175820930734&blobheader¼application%2Fpdf
- [17] GAO (2002). Financial statement restatements: trends, market impacts, regulatory responses, and remaining challenges. Report to the Chairman, US Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Washington, DC.
- [18] Hartzel, J. C., Sun, L., & Titman, S. (2014). Institutional investors as monitors of corporate diversification decisions: Evidence from real estate investment trusts. *Journal of Corporate Finance*, 25 (C), 61–72.
- [19] Hasnan, S., Mohd Razali, M. H., & Mohamed Hussain, A. R. (2020). The effect of corporate governance and firm-specific characteristics on the incidence of financial restatement. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 244–267.
- [20] Irwantoko & Basuki. (2016). Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 92-104.

- [21] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- [22] Khan, H. (2011). A Literature Review of Corporate Governance. *International Conference on E-Business, Management and Economics*, 25, 1-5.
- [23] Lischewski, J., & Voronkova, S. (2012). Size, value and liquidity. Do they really matter on an emerging stock market?. *Emerging Markets Review*, 13(1), 8-25.
- [24] Namazi, M., & Kermani, A., (2008). The effect of ownership structure on the performance of accepted companies in Tehran stock Exchange. *Auditing Review Journal*, 8.
- [25] Nurleni, N., Bandang, A., Darmawati, & Amiruddin. (2018). The effect of managerial and institutional ownership on corporate social responsibility disclosure. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 979-987.
- [26] Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (2014). https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf.
- [27] Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) pada BUMN.
- [28] Pongsaporamat, P. (2016). Ownership structure and the quality of financial reporting in Thailand: The empirical evidence from accounting restatement perspective. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(10), 6799-6810.
- [29] Saragih, P. H. (2019, July 26). Tak Jadi Untung, Garuda Rugi hingga Rp 2,45 T di 2018. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190726090925-17-87737/tak-ja-di-untung-garuda-rugi-hingga-rp-245-t-di-2018>.
- [30] Shetty, S. & Sundaram, R. (2019). Funding acquisition drivers for new venture firms: Diminishing value of human capital signals in early rounds of funding. *Problems and Perspectives in Management*, 17, 78-94.
- [31] Siregar, N. Y., & Rahayu, F. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Restatement dan Dampaknya terhadap Harga Saham. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 12(2), 71-88.
- [32] Siregar, S. V., & Utama, S. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 43(1), 1-27.
- [33] Soroushyar, A., & Ahmadi, S. A. (2016). Corporate Governance and Financial Restatement in Companies Listed in Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science*, 5(3), 181-191.
- [34] Thomsen, S., Pedersen, T., & Kvist, H. K. (2006). Blockholder ownership: Effects on firm value in market and control based governance systems. *Journal of Corporate Finance*, 12(2), 246-269.
- [35] Veronica, S., & Bachtiar, Y. S. (2005). the Role of Corporate Governance in Preventing Misstated Financial Statement. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 159-173.
- [36] Veronica, S., & Bachtiar, Y. (2014). Corporate governance, information asymmetry, and earnings management. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 77-106.
- [37] Zakaria, Z., Purhanudin, N., & Palanimally, Y. R. (2014). Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Trading and Services Sector. *European Journal of Business and Social Sciences*, 3(2), 32-43.
- [38] Zare, I. & Nekounam, J. & Pirzad, A. & Sedaghatjoo, F. & Mosavimotahar, S.. (2013). Role of accounting information systems on relevance of accounting information. *10*. 589-592.
- [39] Zhizhong, H., Juan, Z., Yanzhi, S. and Wenli, X. (2011). Does corporate governance affect restatement of financial reporting? Evidence from China. *Nankai Business Review International*, 2(3), 289-302.